

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI.....	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Hak Menguasai Negara	10
B. Keuangan Negara.....	12
1. Kekayaan Negara	14
2. Kekayaan Negara yang dipisahkan	15
C. Badan Usaha Milik Negara	15
1. Tujuan BUMN.....	15
2. Macam-macam BUMN	16
3. Pengabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMN.....	17
4. Anak perusahaan BUMN	17
D. Perseroan Terbatas	20

1. Ciri dari PT	20
2. Prinsip <i>Separate Legal Entity</i>	21
3. Organ Perseroan	22
3. Modal dan Saham	26
4. Merger, konsolidasi dan akuisisi	30
5. Holding Company	31
E. Notaris	38
1. Kewenangan, Kewajiban, Dan Larangan	39
2. Akibat akta	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis dan Sifat Penelitian	49
B. Cara Perolehan Data.....	50
C. Lokasi penelitian	55
D. Subjek penelitian.....	55
E. Alat Penelitian	56
F. Jalannya Penelitian	56
G. Hambatan Penelitian dan Penyelesaian	57
H. Analisis Data	58
BAB IV PEMBAHASAN	60
A. Status anak Perusahaan PT Industri Kereta Api Persero yaitu PT Inka Multi Solusi	60
1. Profil singkat PT Industri Kereta Api Persero	60
2. Profil singkat PT IMS dan anak perusahaan PT IMS	61
3. Kekhususan bagi Anak Perusahaan BUMN.....	64
4. Analisa Status Anak Perusahaan PT INKA	70

B. Implikasi dari penyertaan modal PT INKA (Pesero) ke Perseroan terbatas lain terhadap kedudukan dan status negara ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.....	73
1. BUMN dan Doktrin <i>Separate legal Entity</i> terhadap kekayaan BUMN.....	73
2. Kedudukan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara dilihat dari UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU nomor 17 tentang Keuangan Negara dan UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD Negara RI tahun 1945.	81
3. Kedudukan dan status negara dalam anak perusahaan BUMN.....	85
C. Akibat Hukum Akta Pendirian Anak Perusahaan BUMN yang Dibuat oleh Notaris yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Doktrin Keuangan Negara	97
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
Daftar Pustaka	114